



---

## Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Tafsir Patriarkal dan Spirit Emansipatif

M. Ainur Rafiq<sup>1</sup>, Selfi Arinie<sup>2</sup>, M. Rieza Fachelvi<sup>3</sup>, Ahmadi<sup>4</sup>

Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [ahmadi@iain-palangka.ac.id](mailto:ahmadi@iain-palangka.ac.id)

---

Article received: 22 Mei 2025, Review process: 02 Juni 2025,  
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 03 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*Women's leadership in Islam is a complex issue, often debated across normative and social dimensions. Although Islamic teachings offer room for female leadership, patriarchal cultural practices and interpretative biases toward religious texts remain key obstacles. This study aims to examine women's leadership in Islam through historical, jurisprudential, social, and psychological perspectives. Utilizing a library research method with qualitative content analysis, the research explores Islamic literature, gender-based exegetical works, and contemporary discourses on Muslim women. The findings reveal that women have played strategic roles in Islamic history and possess legitimate leadership status grounded in maqashid sharia and the principle of justice. Nonetheless, structural and social challenges still hinder women's participation in public leadership. The study recommends gender-just religious reinterpretation and affirmative policy as strategies for empowerment. This research is expected to offer both theoretical insight and practical contribution to the development of a contextual and transformative discourse on Muslim women's leadership.*

**Keywords:** *Women's Leadership, Islam, Patriarchy, Maqashid Sharia, Gender Exegesis*

### ABSTRAK

*Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan dalam ranah normatif dan sosial. Meskipun ajaran Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memimpin, praktik budaya patriarkal dan bias interpretatif terhadap teks-teks keagamaan masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam melalui pendekatan historis, fikih, sosial, dan psikologis. Menggunakan metode studi pustaka dengan analisis isi kualitatif, penelitian ini menelaah literatur keislaman, karya tafsir gender, serta wacana kontemporer terkait perempuan Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan telah memainkan peran strategis dalam sejarah Islam dan memiliki legitimasi kepemimpinan berdasarkan prinsip maqashid syariah dan nilai keadilan. Kendati demikian, tantangan struktural dan sosial masih membatasi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reinterpretasi keagamaan yang adil gender dan penguatan kebijakan afirmatif sebagai strategi pemberdayaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam membangun wacana kepemimpinan perempuan Muslim yang kontekstual dan transformatif.*

**Kata kunci:** *kepemimpinan perempuan, Islam, patriarki, maqashid syariah, tafsir gender*

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis mengatur dan memengaruhi orang lain, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi untuk menjadi pemimpin sesuai kapasitas dan peran sosialnya. Kemampuan untuk memimpin bukanlah bawaan mutlak, tetapi dapat berkembang melalui pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial yang mendukung. Dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi bagian integral dari peran manusia dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam sejarah Islam, perempuan telah menunjukkan peran kepemimpinan yang signifikan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial keagamaan. Tokoh-tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar menjadi representasi nyata kontribusi perempuan dalam masyarakat Islam awal. Namun, perkembangan sejarah dan dinamika sosial kemudian membentuk konstruksi budaya patriarki yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Interpretasi terhadap teks-teks keagamaan pun tidak lepas dari bias gender, yang seringkali menjadi justifikasi atas pembatasan ruang publik bagi perempuan.

Kajian fikih klasik memperlihatkan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kepemimpinan perempuan, terutama dalam konteks kepemimpinan politik. Sebagian pendapat menolak secara mutlak, sementara sebagian lain mengizinkan dalam kondisi dan konteks tertentu. Misalnya, pendapat Imam al-Tabari dan Ibn Jarir menyatakan bahwa tidak ada larangan eksplisit bagi perempuan menjadi pemimpin jika memiliki kapasitas. Sementara itu, hadis yang menyatakan "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan" (HR. Bukhari) sering digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan secara umum, meskipun banyak ulama kontemporer menafsirkan hadis tersebut dalam konteks sejarah Persia saat itu, bukan sebagai larangan mutlak.

Fenomena marginalisasi perempuan dalam ranah publik juga tidak terlepas dari faktor sosial budaya yang melekat dalam masyarakat Muslim. Budaya patriarkal yang telah mengakar kuat menjadikan konstruksi sosial lebih mengutamakan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan peran strategis. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi perempuan dalam ranah politik, pendidikan tinggi, dan kepemimpinan organisasi keagamaan. Padahal, dalam banyak kesempatan, perempuan terbukti memiliki kapasitas kepemimpinan yang tidak kalah dibandingkan laki-laki, bahkan dalam kondisi krisis atau situasi yang menuntut ketangguhan emosional dan sosial.

Di Indonesia, reformasi 1998 membuka ruang baru bagi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan publik. Munculnya tokoh perempuan dalam posisi strategis, termasuk presiden, menteri, dan ketua lembaga negara, menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai kepemimpinan perempuan mulai

bergeser. Namun demikian, tantangan masih tetap ada. Hambatan struktural, stereotip negatif, serta beban ganda yang dialami perempuan dalam ranah domestik dan publik menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif, peningkatan akses pendidikan, dan pembentukan budaya organisasi yang inklusif bagi perempuan.

Secara psikososial, perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang kuat, terutama dalam aspek komunikasi interpersonal, empati, dan keteguhan moral. Kajian psikologi kepemimpinan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, yang lebih banyak dimiliki oleh perempuan, justru lebih efektif dalam membangun kohesi kelompok dan mencapai tujuan jangka panjang. Dengan demikian, pelibatan perempuan dalam kepemimpinan bukan semata-mata tuntutan kesetaraan gender, tetapi kebutuhan strategis dalam membangun masyarakat yang seimbang dan responsif terhadap dinamika zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan perempuan dalam Islam dari perspektif historis, fikih, sosial, dan psikologis. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana teks-teks keagamaan dimaknai dalam konteks kepemimpinan perempuan, apa saja tantangan sosial budaya yang dihadapi perempuan Muslim, serta bagaimana strategi pemberdayaan dapat dilakukan untuk mendorong perempuan tampil sebagai pemimpin dalam ruang publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat wacana kepemimpinan perempuan yang berkeadilan dan kontekstual.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi wacana kepemimpinan perempuan dalam Islam dari berbagai perspektif, seperti sejarah, fikih, sosial, dan psikologis. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur berupa buku, artikel jurnal, dokumen keagamaan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyintesis informasi yang terkandung dalam sumber-sumber pustaka guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu kepemimpinan perempuan dalam konteks ajaran Islam dan dinamika sosial-kultural kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Jejak Sejarah dan Landasan Teologis**

Perempuan telah memainkan peran signifikan dalam sejarah peradaban Islam sejak masa awal kenabian. Tokoh seperti Khadijah binti Khuwailid tidak hanya dikenal sebagai istri Rasulullah, tetapi juga pengusaha yang menyokong dakwah Islam dengan harta dan kepemimpinannya. Demikian pula, Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai cendekiawan perempuan yang meriwayatkan ribuan hadis dan menjadi rujukan keilmuan bagi para sahabat. Kiprah tokoh-tokoh ini

---

memperlihatkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual, spiritual, dan sosial untuk mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat.

Pandangan normatif dalam Islam mengenai kepemimpinan perempuan kerap kali ditarik dari dalil-dalil teks yang ditafsirkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks. Misalnya, hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung bila dipimpin oleh perempuan sering dipahami sebagai pelarangan mutlak. Padahal, para ulama kontemporer seperti Musdah Mulia dan Husein Muhammad menekankan pentingnya memahami hadis tersebut dalam konteks historis-politik Persia saat itu, bukan sebagai prinsip universal. Ini memperlihatkan bahwa pendekatan tafsir gender menjadi sangat penting untuk menghindari generalisasi yang menindas.

Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk memimpin. Sebaliknya, dalam QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. At-Taubah: 71, ditegaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada ketakwaan, bukan jenis kelamin. Hal ini memberikan ruang teologis yang kuat bagi perempuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan sepanjang memiliki kapasitas dan niat yang lurus. Dalam kerangka maqashid syariah, kepemimpinan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yang bisa dicapai oleh siapa pun tanpa memandang jenis kelamin.

Dalam pendekatan feminisme Islam, kepemimpinan perempuan dipandang sebagai bagian dari upaya merestorasi keadilan gender yang terdistorsi oleh budaya patriarki. Asma Barlas dan Amina Wadud menyoroti bahwa banyak ketimpangan dalam praktik keagamaan lahir bukan dari teks suci, tetapi dari tafsir yang bias gender. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan keagamaan dan sosial merupakan wujud koreksi terhadap dominasi tafsir patriarkal yang selama ini membatasi ruang perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Khoer et al. (2021) menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam memiliki legitimasi kepemimpinan yang kuat jika dilihat dari sisi fikih kontemporer. Mereka mengidentifikasi adanya kecenderungan perubahan pemahaman dalam masyarakat Muslim yang lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam struktur formal kepemimpinan. Ini menegaskan bahwa wacana kepemimpinan perempuan tidak lagi menjadi tabu, tetapi telah bertransformasi menjadi kebutuhan sosial yang sah secara keagamaan.

Secara historis, Al-Qur'an juga mengangkat sosok Ratu Balqis dari negeri Saba sebagai pemimpin yang bijaksana. Dalam QS. An-Naml: 23-44, tidak ada celaan terhadap status kepemimpinannya, bahkan keputusan-keputusannya dipuji karena penuh pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam apabila didasarkan pada keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks Indonesia, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan mulai mengalami pergeseran. Kegiatan edukatif dan diskursus publik yang digagas oleh organisasi perempuan Muslim seperti Rahima, Puan Amal Hayati, dan Forhati telah memberikan kontribusi besar dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan. Hal ini berkontribusi pada

---

meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan, dan struktur keagamaan.

Dengan demikian, secara normatif dan historis, tidak terdapat larangan absolut terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam. Yang diperlukan adalah penafsiran ulang terhadap teks keagamaan yang selama ini dikungkung oleh dominasi laki-laki. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan tafsir gender, maka perempuan dapat dilihat sebagai subjek aktif dalam pembangunan sosial dan keagamaan, termasuk dalam posisi kepemimpinan.

### **Hambatan Sosial-Budaya dalam Kepemimpinan Perempuan**

Meskipun landasan normatif Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memimpin, kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya hambatan struktural yang mengakar. Budaya patriarki yang telah berlangsung turun-temurun menempatkan perempuan dalam posisi domestik, dan menganggap kepemimpinan sebagai ranah eksklusif laki-laki. Hal ini menghambat perkembangan kepemimpinan perempuan, terutama dalam bidang politik dan birokrasi.

Stereotip sosial seperti anggapan bahwa perempuan lebih emosional, kurang rasional, dan tidak mampu mengambil keputusan strategis, masih banyak diyakini oleh masyarakat. Stereotip ini bukan hanya memengaruhi persepsi publik, tetapi juga membatasi ruang gerak perempuan dalam meniti karier kepemimpinan. Dalam banyak kasus, perempuan yang tampil memimpin justru mengalami resistensi ganda, baik dari laki-laki maupun dari sesama perempuan.

Selain stereotip, hambatan struktural juga hadir dalam bentuk kebijakan dan sistem kelembagaan yang kurang berpihak. Representasi perempuan dalam posisi strategis masih sangat minim. Data dari BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di legislatif dan eksekutif masih di bawah 30%. Ini memperlihatkan belum tercapainya kesetaraan representasi yang adil dalam pengambilan kebijakan.

Penelitian Novianti (2008) menyoroti bahwa beban ganda yang dialami perempuan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja publik, menjadi hambatan serius dalam pengembangan kepemimpinan. Perempuan kerap kali dituntut untuk menyeimbangkan peran ganda tanpa adanya dukungan struktural dari negara maupun masyarakat. Akibatnya, potensi kepemimpinan perempuan tidak berkembang secara optimal.

Dalam perspektif teori gender, konsep “peran gender tradisional” menjadi sumber pembatasan terhadap akses perempuan dalam ruang publik. Peran ini dibentuk secara sosial dan bukan merupakan kodrat biologis. Oleh karena itu, pendekatan konstruktivis terhadap gender penting diterapkan agar masyarakat dapat memahami bahwa kepemimpinan bukanlah domain satu jenis kelamin, melainkan fungsi sosial yang terbuka bagi siapa saja.

Salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui pendidikan gender yang berkelanjutan. Pendidikan yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan akan membentuk generasi baru yang lebih terbuka terhadap keberagaman peran sosial. Program-program afirmatif seperti kuota legislatif bagi

perempuan, pelatihan kepemimpinan, dan perlindungan kerja juga menjadi langkah strategis dalam membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan.

Dalam diskursus akademik, peran perempuan dalam masyarakat patriarkal dapat dianalisis melalui pendekatan interseksionalitas. Konsep ini menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor lain seperti kelas sosial, pendidikan, dan agama. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang inklusif dan multisektoral sangat diperlukan untuk memberdayakan perempuan secara holistik.

Dukungan dari institusi keagamaan juga sangat krusial dalam membongkar narasi-narasi diskriminatif. Ulama perempuan, akademisi, dan aktivis Islam progresif harus mengambil peran strategis dalam menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam kepemimpinan. Kolaborasi antara institusi agama, negara, dan masyarakat sipil dapat mempercepat transformasi sosial menuju masyarakat yang adil gender.

### **Kontribusi dan Arah Baru Kepemimpinan Perempuan Muslim di Indonesia**

Perempuan Muslim di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan. Keberhasilan tokoh seperti Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama, Sri Mulyani di bidang ekonomi, dan Siti Musdah Mulia dalam bidang keagamaan adalah contoh nyata bahwa perempuan mampu memimpin dengan baik dalam ruang publik. Fenomena ini menjadi penanda penting adanya perubahan orientasi budaya politik dan sosial terhadap peran perempuan.

Reformasi 1998 menjadi momentum krusial yang membuka akses politik lebih luas bagi perempuan. Sejak itu, kuota legislatif untuk perempuan mulai diterapkan, dan partisipasi perempuan dalam lembaga formal meningkat, meskipun belum mencapai representasi ideal. Namun demikian, kehadiran perempuan dalam lembaga formal masih menghadapi tantangan dari aspek ideologi konservatif yang memandang kepemimpinan perempuan sebagai penyimpangan dari kodrat.

Penelitian Prasetiawan dan Lis (2019) menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam, seperti di pesantren dan madrasah, mulai mendapatkan legitimasi sosial yang lebih luas. Perempuan kini tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga pemimpin institusi pendidikan dan pengambil kebijakan. Ini membuktikan bahwa ruang kepemimpinan berbasis nilai Islam terbuka bagi perempuan jika ditopang oleh pendekatan yang inklusif dan partisipatif.

Di level akar rumput, banyak gerakan perempuan Muslim yang aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat, advokasi hak perempuan, dan penyuluhan keluarga. Perempuan berperan sebagai agen perubahan yang membawa nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keberlanjutan. Gerakan ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak harus selalu formal dan institusional, tetapi bisa bersifat transformasional dalam ruang sosial yang lebih luas.

Kontribusi perempuan juga semakin terlihat dalam bidang ekonomi syariah, kewirausahaan sosial, dan lembaga zakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan

mampu menjadi pelaku utama dalam sektor ekonomi keumatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan spiritual umat Islam secara kolektif.

Dalam analisis maqashid syariah, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan merupakan bentuk penjagaan terhadap masalah umum (masalah 'ammah). Selama perempuan menjalankan amanah dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, maka kepemimpinan mereka sah dan bahkan mendesak untuk diperkuat dalam menjawab tantangan zaman. Ini selaras dengan prinsip al-adl (keadilan) sebagai inti dari tujuan syariah.

Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan dari partisipasi perempuan dalam kepemimpinan melalui sistem rekrutmen yang adil, regulasi yang progresif, dan pembentukan jaringan kepemimpinan yang saling menopang. Hal ini hanya bisa dicapai apabila negara, masyarakat, dan institusi keagamaan berjalan seiring dalam menumbuhkan iklim inklusif bagi perempuan.

Dengan demikian, kepemimpinan perempuan Muslim di Indonesia tidak lagi menjadi wacana pinggir, tetapi telah menjadi arus utama yang memengaruhi arah perubahan sosial. Perempuan tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga aktor utama yang meneguhkan nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan kemajuan dalam kerangka Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## SIMPULAN

Kesimpulan, kepemimpinan perempuan dalam Islam, sebagaimana tergambar dari tinjauan historis, normatif, dan sosial, merupakan isu yang kompleks namun progresif. Meskipun berbagai hambatan sosial-budaya dan interpretasi patriarkal terhadap teks keagamaan masih menjadi tantangan, landasan teologis Islam melalui pendekatan maqashid syariah, tafsir kontekstual, dan prinsip keadilan gender memberikan ruang yang sah bagi perempuan untuk memimpin. Sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan telah memainkan peran penting dalam kepemimpinan publik, dan dalam konteks Indonesia modern, mereka semakin berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga politik dan ekonomi. Untuk memperkuat peran ini, diperlukan upaya kolektif yang mencakup edukasi, reformasi kebijakan, dan dukungan institusional guna menciptakan ekosistem sosial yang adil dan inklusif. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan bukan hanya wacana kesetaraan, melainkan kebutuhan strategis bagi kemajuan peradaban Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fatimah, S. (2015). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 90-102.
- Hazani, D. C. (2022). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam di era modern. *Masaliq*, 2(5), 679-693. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i5.831>
- Hamka, H. (2013). Kepemimpinan perempuan dalam era modern. *Al-Qalam*, 19(1), 107-116.

- 
- Ibnu Khoer, F., Gustiawati, S., & Yono. (2021). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam: Studi analisis M. Quraish Shihab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 3(2), 33-50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>
- Islam, U., & Alauddin, N. (2024). Tantangan dan peluang kepemimpinan perempuan dalam masyarakat: Perspektif hukum Islam. *Jurnal Prespektif Hukum Islam*, 2(2), 85-94.
- Kuwano, M., & 桑野満子. (2005). Tonton kenkun kokoro wa genki ni shitemasuka. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 81-98. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/714/607>
- Novianti, I. (2008). Dilema kepemimpinan perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi & Anak*, 3(2), 255-261.
- Prasetiawan, A. Y., & Lis, S. (2019). Kepemimpinan perempuan dalam pesantren. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1), 39-69. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2874>
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam: Studi komparatif antara pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia. *Khazanah*, 6(1), 65-97. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>